

## ABSTRAK

**Simarmata, Dosiraja.** Pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Dairi (Studi Kasus Pelaksanaan Pemerintah di Kecamatan Siempat Nempu). Kajian Antropologi Hukum.

Terbitnya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang telah diubah dan diganti dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menimbulkan suatu fenomena baru dalam sistem Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang ini diisyaratkan, di setiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebuah lembaga baru sebagai mitra Pemerintah Desa. Kehadiran lembaga BPD membawa suatu perubahan dalam mekanisme sistem Pemerintahan Desa, selain lembaga baru ini berwenang untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga harus mengesahkan segala ketentuan-ketentuan yang mengikat di desa.

Di Kabupaten Dairi khususnya di wilayah penelitian di kecamatan Siempat Nempu, lembaga ini telah menjadi perhatian maupun pembicaraan para pejabat kabupaten ataupun para warga desa itu sendiri karena dampaknya telah menimbulkan berbagai konflik dalam hubungan antar lembaga desa maupun antar sesama warga. Fenomena ini perlu dilihat dan diteliti dan diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Dairi, pemerintah kecamatan Siempat Nempu, maupun pemerintahan desa agar dapat tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan antar lembaga desa maupun sesama warga desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan peranan lembaga desa dalam kehidupan masyarakat desa dan melihat apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan lembaga BPD maupun hubungan kerjanya sebagai mitra Pemerintah Desa telah cukup baik untuk mengakomodir segala budaya desa dan elemen para tokoh-tokoh masyarakat desa.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sampel penelitian yang dilakukan secara tidak terbatas yang dihimpun melalui pewawancaraan tidak berstruktur dan tidak terstandarisasi, observasi dan dokumen akan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis masalah penelitian.

## ABSTRACT

**Simarmata, Dosiraja.** The effect of Badan Permusyawaratan Desa (Village Advisory Board) existence in system of village government administration in Dairi Regency (A case study on government administration in Siempat Nempu District). A Law Anthropology Study.

The existence of regulation No.22 of 1999 which had been changed and substituted by regulation No. 32 of 2004 about District Government administration, had cause a new phenomenon in system of village government administration. It is stated in this regulation that a village should have a village advisory board, a new institution as a partner of village government. This board has given a new change in the mechanism of village government administration. Beside its authority in supervision and asking the village government responsibility upon their duty, this board also had to legalize the role and stipulation of the village.

In Dairi Regency, especially in Siempat Nempu district, as the location of this research this board has become an interest for the officers of the regency, and the villagers. Because it has raise some conflict in relation of institutions of the village and among the villagers themselves. This phenomenon is need to be observed and was hoped could give a kind of input for the government of Dairi Regency, government of Siempat Nempu District, and also for the government of the village in order to keep the harmony and togetherness of institutions of village or the villagers.

This research applies the qualitative approach in order to discover the role of the institution of the village in the villagers way of live and observe whether the rules of about the board establishment and its function as partner for government of the village has fulfill the need of cultures and public figures in the village.

This research had used unlimited sampling research technique and unstandardized interview, observations and documents used as references in analizing the problem of the research.